



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOUDY HERMAWAN
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI PAPUA
3. NHK : 472872

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.122.658.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 462.610.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/76 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.660.048.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.600.000

1. MOTOR, HONDA VERZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
3. MOBIL, WULING CORTEZ Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.700.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. 7.417.070

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 200.855.509

F. HARTA LAINNYA Rp. 23.485.119

Sub Total Rp. 2.495.715.698

III. HUTANG Rp. 340.843.967

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.154.871.731

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.